

Implementasi Kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Lina Herlina¹, Erlan Suwarlan², Asep Nurdin Rosihan Anwar³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Galuh

¹linahaereliena@gmail.com, ²erlan.tasik@gmail.com,

³asepnurdinrosihananwar2@gmail.com

Dikirim: 10 Juni 2022 Direvisi: 29 November 2022 Diterima: 6 Desember 2022

Abstrak

Observasi awal di Desa Kertabumi ditemukan permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang konseling perilaku remaja oleh pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yaitu masih ditemukan kenakalan remaja karena rendahnya minat remaja untuk ikut andil dalam kegiatan PIK-R. Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan tentang konseling perilaku remaja oleh pengurus PIK-R di Desa Kertabumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan jumlah informan sebanyak 10 (sepuluh) orang. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi lapangan (observasi, wawancara). Penelitian ini mengambil teori dari Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2014) mengenai 6 dimensi yang berpengaruh terhadap hasil implementasi kebijakan yakni tujuan kebijakan dan standar yang jelas, sumber daya, kualitas hubungan interorganisasional, karakteristik lembaga pelaksana, lingkungan politik, sosial dan ekonomi serta disposisi implementor. Teknik pengolahan/analisis data dengan cara reduksi data, sajian data dan verifikasi data. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang konseling perilaku remaja oleh pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi masih belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ditemukan berbagai permasalahan dalam dimensi sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana serta kualitas hubungan interorganisasional.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pusat Informasi dan Konseling Remaja

Abstract

Based on the results of initial observations in Kertabumi Village, problems were found related to the implementation of policies regarding adolescent behavior counseling by the management of the Youth Information and Counseling Center (PIK-R), namely juvenile delinquency was still found due to the low interest of adolescents to take part in PIK-R activities. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of policies regarding adolescent behavior counseling by PIK-R administrators in Kertabumi Village. This study uses a qualitative method. The data in this study are primary and secondary data with a total of 10 (ten) informants. While data collection techniques through documentation and field studies (observations, interviews). This study takes the theory from Van Meter and Van Horn (Anggara, 2014) regarding the 6 dimensions that influence the results of

policy implementation, namely clear policy objectives and standards, resources, quality of interorganizational relations, characteristics of implementing agencies, political, social and economic environment and implementer's disposition. Data processing/analysis techniques by means of data reduction, data presentation and data verification. The results of the study indicate that the implementation of policies regarding adolescent behavior counseling by the management of the Information Center and Youth Counseling in Kertabumi Village is still not fully running optimally. This is evidenced by the fact that various problems are still found in the dimensions of resources, characteristics of implementing agencies and the quality of interorganizational relations.

Keywords: *Policy Implementation, Youth Information and Counseling Center*

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan kelompok usia yang sangat rawan terhadap tiga urusan pokok kesehatan reproduksi remaja (triad KRR) yakni seks bebas, HIV/AIDS, penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) (Kaltimprov, 2013). Sebagai generasi harapan bangsa, remaja merupakan kelompok usia yang berpotensi memiliki andil besar untuk keberlanjutan pembangunan, oleh sebab itu remaja harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik sebagai pemimpin di masa mendatang. Terkait dengan pertumbuhan dan perkembangannya, remaja perlu mendapatkan bimbingan dari orang tua, sekolah serta lingkungan sehingga remaja akan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Remaja juga perlu diberikan wadah aktualisasi diri bersama kelompok sebayanya karena usia remaja seringkali lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman sebayanya (Mayasari, 2017).

Masalah remaja sampai saat ini sudah menjadi masalah sosial yang masih terus membutuhkan penanganan. Pemerintah telah membuat langkah antisipasi melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan mengamanatkan pembentukan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). Dalam Kampung KB diperkenalkan program Generasi Berencana (GenRe) yang berkaitan dengan upaya menangani permasalahan remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Hadirnya Pusat Informasi dan Konseling Remaja sendiri dilatarbelakangi oleh keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, kemudian Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga dalam pasal 22 disebutkan bahwa pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membentuk dan mengembangkan: dalam huruf b yaitu pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa. Dengan demikian, Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa (PIK KRR/M) atau yang kerap disebut PIK-R dibentuk sebagai salah satu wadah yang dikendalikan dari, oleh dan untuk remaja guna menyediakan pelayanan informasi maupun konseling mengenai pendewasaan usia pernikahan, 8 fungsi keluarga, kesehatan reproduksi,

life skill, gender, kemudian keterampilan advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

BKKBN dalam menyelenggarakan pemerintahannya berwenang untuk membentuk dan melaksanakan program agar dapat mengatur kehidupan masyarakat. Desa Kertabumi merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang mana terdapat salah satu dusun yang dibentuk menjadi Kampung Keluarga Berencana yaitu Dusun Nagrog yang saat ini sedang menghadapi permasalahan berkaitan dengan remaja. Sebagai tindak lanjut dari penancangan Kampung KB, selanjutnya dilakukan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang anggotanya merupakan generasi muda setempat.

Di Desa Kertabumi, kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja sudah berlangsung sejak tahun 2017 sebagaimana awal pembentukannya termasuk susunan kepengurusan yang sudah dikukuhkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas SK Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) “Mawar” di Dusun Nagrog Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 sebagai wujud upaya pemerintah untuk menangani permasalahan remaja dan diharapkan dapat menyediakan informasi dan penyuluhan bagi keluarga dalam mewujudkan hidup remaja berkualitas. Adapun definisi program Pusat Informasi dan Konseling Remaja yaitu suatu ajang kegiatan program generasi berencana dalam merancang kehidupan rumah tangga bagi remaja yang dikendalikan dari, oleh dan untuk remaja guna menyediakan bantuan informasi serta konseling mengenai persiapan kehidupan rumah tangga bagi remaja serta berbagai kegiatan pendukung lainnya (BKKBN, 2012).

Berbagai penelitian terdahulu dengan beragam masalah pada implementasi kebijakan telah banyak dilakukan. Untuk bahan perbandingan dalam penyusunan penelitian penulis, maka ditemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nicodemus R Toun dan Hayatun Nufus (2015) dengan judul Implementasi Program Pusat Informasi Konseling Mahasiswa (PIK-M) BKKBN di Kota Palangka Raya. Dalam penelitian tersebut terdapat permasalahan di Kota Palangka Raya yakni masih maraknya tindakan beresiko dan menyimpang yang dilakukan oleh remaja atau mahasiswa. Metode penelitian deskriptif kualitatif dipakai dalam penelitian ini dengan mengambil teori Cheema & Rondinelli terkait 4 faktor yang memberi pengaruh terhadap implementasi kebijakan yakni keadaan lingkungan, hubungan antar kelompok, sumber daya, serta karakteristik dan keahlian implementor. Hasil dari penelitian ini yaitu di Kota Palangka Raya implementasi program pusat informasi mahasiswa sudah dilaksanakan namun belum berhasil secara keseluruhan. BKKBN sebagai fasilitator, BPP KB Kota dan pihak Universitas sebagai pembina, pemantau dan pengelola dari program ini sebenarnya sudah melaksanakan tugasnya, namun belum maksimal karena keterbatasan dana yang dimiliki juga kurangnya koordinasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam program Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Glori Cahya Putri (2019) dengan judul Pelaksanaan Program PIK R dan Dampaknya bagi Remaja (Studi Deskriptif di Kampung Keluarga Berencana (KB) Desa Sukoreno Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember), didapatkan permasalahan yaitu maraknya seks bebas, penyalahgunaan NAPZA, terinfeksi penyakit HIV/AIDS, serta masih tingginya angka pernikahan dini. Metode yang dipakai yakni deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil teori dari Brian W Hogwood & Lewis A. Gunn terkait beberapa tahapan implementasi yaitu tahap pertama menggambarkan taktik kebijakan

dengan menetapkan tujuan yang jelas, tahap kedua memanfaatkan struktur, pegawai, sumber daya, prosedur, dana serta metode, dan tahap ketiga yaitu membuat jadwal, melakukan pemantauan, serta mengadakan *monitoring*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kampung KB Desa Sukoreno penyelenggaraan program PIK-R yang dilihat dari 3 tahapan di atas belum berjalan maksimal karena sulitnya menyesuaikan jadwal antar anggota PIK-R, mulai banyaknya kesibukan para anggota dengan pekerjaan baru sehingga kegiatan rutin di dalam PIK-R yaitu pendidik dan konselor sebaya serta budidaya lele dan pemanfaatannya melalui pembuatan nugget lele juga mulai berkurang.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis bahwa persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah judul yang relevan yakni tentang pembahasan mengenai permasalahan dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Selain itu penelitian tersebut juga menggunakan metode penelitian yang sama yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu dalam hal teori untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Perbedaan lainnya adalah objek penelitian, jika di penelitian sebelumnya cakupan analisisnya wilayah kota, sedangkan objek penelitian penulis fokus di wilayah desa sehingga lebih spesifik.

Lokus penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dan fokus penelitiannya hanya sebatas penelitian mengenai implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dengan teori Van Meter dan Van Horn karena model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Peneliti juga ingin mencari tahu implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dari berbagai *stakeholder* tidak hanya dari instansi pemerintahan saja, karena dalam melaksanakan suatu program diperlukan peran-peran *stakeholder* lainnya.

Membahas mengenai implementasi kebijakan, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah implementasi didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Daniel Mazmanian & Paul Sabatier (Suparno, 2017) memberikan definisi implementasi sebagai penyelenggaraan keputusan program dasar, baik dalam bentuk perundangan, perintah, keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan. Umumnya, keputusan itu menandai permasalahan yang hendak diperbaiki, mengatakan secara tegas maksud yang hendak diraih, serta beberapa tahapan untuk menyusun proses implementasi. Tidak hanya itu, definisi implementasi juga dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn (Anggara, 2014) yakni implementasi merupakan berbagai tahapan yang dijalankan oleh perorangan maupun kelompok pemerintah atau swasta yang mengarah pada ketercapaian sasaran yang sudah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Adapun yang dimaksud dengan implementasi kebijakan menurut Charles O Jones (Suparno, 2017) ialah kemampuan untuk membuat interaksi-interaksi berikutnya dalam hubungan sebab-akibat antara tindakan dengan tujuan. Jadi dalam hubungannya dengan suatu kebijakan publik, disini adanya upaya membentuk kaitan antara tindakan dengan tujuan program yang hendak dicapai.

Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2014) mengemukakan terdapat enam dimensi yang berpengaruh terhadap hasil implementasi kebijakan yakni:

- a) Tujuan kebijakan dan standar yang jelas
Dimensi ini mendasari kepentingan utama terhadap berbagai faktor penentu kinerja kebijakan. Indikator kerja ini menilai seberapa jauh sasaran dan standar kebijakan telah dijalankan.
- b) Sumber daya
Sumber daya disini membutuhkan perhatian sebab menunjang keberhasilan implementasi seperti manusia, anggaran atau fasilitas yang bisa mendorong implementasi yang efektif.
- c) Kualitas hubungan interorganisasional
Proses dan mekanisme kelembagaan mengharuskan struktur yang berada di atas melakukan *controlling* agar implementasi kebijakan bergerak sesuai standar ataupun tujuan yang sudah ditentukan.
- d) Karakteristik lembaga pelaksana
Berkaitan dengan kompetensi serta ukuran implementor, tingkat hierarkis pada implementor terbawah dalam implementasi, serta hubungan formal maupun informal dengan pembuat kebijakan.
- e) Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi
Dampak dari kondisi ini pada implementasi kebijakan merupakan pusat perhatian mengenai seberapa besar pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap suatu kebijakan atau sebaliknya.
- f) Disposisi implementor
Pemahaman implementor mengenai sasaran serta standar program merupakan hal penting. Implementasi kebijakan akan sukses apabila pelaksana memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap tujuan program. Hal ini menjawab bahwa tidak berhasilnya pelaksanaan suatu kebijakan dapat disebabkan oleh tidak taatnya implementor terhadap kebijakan.

Dalam RJPMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 disebutkan bahwa keikutsertaan masyarakat di wilayah Kampung KB dalam pembangunan lintas sektor masih rendah. Di sisi lain masalah sosial seperti NAPZA, HIV di kalangan remaja pun masih cukup tinggi.

Adapun menurut hasil observasi awal, indikator permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan K/0/PIK R/M/13 dalam profil kualitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja didapatkan informasi bahwa kader Pusat Informasi dan Konseling Remaja Mawar belum memahami seluruh materi khusus yang seharusnya dikuasai oleh kader Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta kurangnya acara yang mampu menarik minat remaja untuk ikut andil di dalamnya.
2. Tidak adanya mitra kerja dalam pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta lemahnya komunikasi antara Pusat Informasi dan Konseling Remaja Mawar Desa Kertabumi dengan PIK-R di Desa lain.
3. Belum ada kegiatan pelatihan keterampilan tentang mekanisme pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja kepada pendidik dan konselor sebaya serta pengelola dari dinas terkait.
4. Kurang optimalnya peran pendidik dan konselor sebaya dalam menyampaikan materi penyuluhan substansi program generasi berencana kepada remaja, sehingga diperlukan

upaya peningkatan kualitas pengetahuan penyuluh atau pengurus agar proses pembinaan bagi remaja lebih direspon.

5. Kriteria program perencanaan keluarga dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi dimana keikutsertaan remaja masih rendah.

Yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Kertabumi adalah karena berdasarkan penjelasan dari kader kelompok kerja Kampung KB dan beberapa media disebutkan bahwa pada akhir tahun 2020 Kampung KB Mawar mendapatkan trofi sebagai juara 1 Kampung KB terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat kategori Kabupaten. Yang mana hal ini merupakan sinergitas semua pihak yang terlibat mulai dari kader kampung KB Mawar, dinas, instansi serta pihak lainnya termasuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja di dalamnya. Tidak hanya itu, Desa Kertabumi juga mempunyai potensi sumber daya manusia remaja yang dapat dikembangkan, sehingga penting untuk diteliti.

Adapun potensi sumber daya manusia yang dimiliki Desa Kertabumi berdasarkan usia bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Usia Sumber Daya Manusia

No	Kategori	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Penduduk Umur 0 - 9 Tahun	135	153
2	Penduduk Umur 10 - 24 Tahun	312	338
3	Penduduk Umur 25 - 39 Tahun	259	264
4	Penduduk Umur 40 - 54 Tahun	267	263
5	Penduduk Umur 55 - 69 Tahun	220	269
6	Penduduk Umur 70> Tahun	127	136
Total		1320	1423

(Sumber: Profil Desa Kertabumi, 2021)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kelompok remaja usia 10-24 tahun di wilayah Desa Kertabumi memiliki jumlah yang cukup banyak sehingga diharapkan dapat dipersiapkan menjadi generasi yang lebih berkualitas dan memiliki kemampuan serta daya saing yang nantinya akan membentuk generasi baru yang mandiri. Dengan terbentuknya generasi yang demikian diharapkan dapat mewarnai pertumbuhan pembangunan bangsa Indonesia untuk melangkah menjadi negara lebih maju.

Melihat dari deskripsi di atas, maka dapat dijelaskan permasalahan utamanya dalam bentuk pertanyaan yakni bagaimana implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis memakai jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berprinsipkan pada gagasan postpositivisme, dipakai untuk meneliti pada keadaan obyek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data secara triangulasi, data yang ditemukan dan analisis data bersifat kualitatif, kemudian hasilnya lebih menekankan maksud daripada penyamarataan (Sugiyono, 2017). Gagasan postpositivisme dalam hal ini memiliki makna bahwa peneliti tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif, untuk itu perlu menggunakan prinsip triangulasi yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data dan data.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis kurang lebih selama satu bulan untuk pengumpulan datanya. Adapun jumlah informan dalam penelitian sebanyak 10 orang yakni Kepala Desa Kertabumi, Sekretaris Desa Kertabumi, Ketua Pusat Informasi dan Konseling Remaja Mawar, 2 orang Kader Pusat Informasi dan Konseling Remaja Mawar, Kepala Dusun Nagrog, perwakilan RW, perwakilan RT serta 2 orang remaja Desa Kertabumi yang bukan bagian dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja Mawar.

Selanjutnya yang menjadi aspek analisis dalam penelitian ini yaitu indikator yang membahas implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dengan menggunakan model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2014) yakni tujuan kebijakan dan standar yang jelas, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, kualitas hubungan interorganisasional, lingkungan politik, sosial dan ekonomi serta disposisi implementor.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi lapangan (observasi, wawancara). Sedangkan analisis datanya yakni dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal formulasi kebijakan, pemerintah harus mengkaji apakah kebijakan yang dibuat memang diperlukan masyarakat atau tidak sehingga kebijakan publik tersebut nantinya akan memberikan manfaat positif serta tidak ada pihak yang dirugikan. Setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui observasi maupun wawancara dengan informan, maka peneliti memperoleh data dan informasi dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Data yang diperoleh selama penelitian ini disajikan dalam bentuk analisis data yang diolah dari hasil wawancara sehingga dapat diinterpretasikan dalam penyajian data. Data-data yang diperoleh peneliti melalui data primer akan peneliti sajikan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian ini akan peneliti uraikan sesuai dengan fokus penelitian mengenai model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang memformulasikan adanya 6 (enam) dimensi yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan yaitu:

1. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas

Tujuan kebijakan dan standar yang jelas merupakan faktor fundamental dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sasaran dan standar kebijakan yang jelas ialah sesuatu yang mesti dipraktikkan dalam suatu kebijakan. Sasaran kebijakan dan standarnya harus transparan serta dapat dipahami oleh para implementor sehingga dapat direalisasikan. Ketika hal tersebut terlalu ideal maka akan sulit direalisasikan (Ariani, 2018).

Untuk mencari tahu implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi, maka penulis melakukan pembahasan berdasarkan masing-masing dimensi. Pada dimensi tujuan kebijakan dan standar yang jelas penulis menguraikan ke dalam dua indikator yang terdiri dari:

Sasaran kebijakan

Untuk dapat menunjang kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja melalui implementasi yang lancar, maka harus tercapainya sasaran kebijakan. Adapun sasaran dari program Pusat Informasi dan Konseling Remaja adalah untuk mengembangkan pemahaman, pengetahuan, serta perilaku yang baik mengenai kesehatan dan berbagai hak reproduksi untuk mengembangkan standar kesehatan reproduksinya dan Persiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) dalam memecahkan persoalan peningkatan kualitas.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sasaran dari kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi dapat diterima oleh implementor maupun masyarakat. Untuk ketercapaiannya belum sepenuhnya tercapai dengan baik, akan tetapi dengan adanya kebijakan ini sudah mampu memberikan manfaat terhadap remaja di Desa Kertabumi. Salah satu manfaat yang dirasakan remaja adalah pengetahuan remaja mengenai berbagai permasalahan berkaitan dengan kenakalan remaja semakin meningkat. Berdasarkan hasil observasi, remaja diharapkan mampu memanfaatkan teknologi yang ada dengan melakukan pembelajaran secara *online*, kemudian melakukan *sharing* materi-materi penunjang berkaitan dengan remaja serta memposting kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui media sosial mengenai kebijakan PIK-R dengan cara yang unik dan kreatif agar dapat menarik minat remaja sebaya di sekitarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menganalisa bahwa dalam indikator sasaran kebijakan, sasaran kebijakan PIK-R yang ada di Desa Kertabumi belum maksimal. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pelaksanaan kebijakannya, remaja PIK-R Mawar tidak sepenuhnya bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan dalam sasaran kebijakan tersebut sehingga pihak eksternal pun tidak mengetahui berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Standar kebijakan

Standar kebijakan turut menentukan ketercapaian tujuan dari implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, khususnya di Desa Kertabumi. Standar kebijakan tentunya harus jelas dan terukur.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa setiap implementor sudah memiliki pemahaman perihal standar dari kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja yaitu pedoman pengelolaan yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 88/PER/F2/2012. Pedoman ini digunakan sebagai tumpuan bagi para pengelola program Pusat Informasi dan Konseling Remaja ataupun seluruh pihak yang terjun dalam membentuk, mengembangkan dan membina anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja baik dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Kemudian seluruh implementor mengutarakan standar tersebut telah mampu menjadi tiang dalam melaksanakan kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi.

Berdasarkan uraian di atas, sejalan dengan informasi-informasi dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa para informan telah memahami apa yang menjadi standar dari kebijakan tersebut yakni buku pedoman pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M) yang berasal dari BKKBN. Adapun sasaran kebijakan tentang konseling perilaku remaja oleh pengurus PIK-R yaitu meningkatkan kualitas remaja sebagai upaya dalam membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Namun, dalam pelaksanaannya seluruh tahapan kegiatan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan pedoman yang ada.

2. Sumber daya

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor yang esensial untuk diperhatikan dalam implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Berhasilnya implementasi kebijakan berpegang kepada mampu tidaknya implementor dalam menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya yang memadai dituntut untuk ada dalam setiap tahapan implementasi (Rahayu, 2018). Sumber daya sendiri dibagi menjadi tiga indikator yang dipakai dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, diantaranya yaitu sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas.

Sumber daya manusia

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, sumber daya manusia merupakan sumber daya utama. Mengikuti hasil wawancara diperoleh informasi bahwa selama ini sumber daya manusia dalam kepengurusan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Mawar di Desa Kertabumi sudah memiliki kecukupan. Dengan kecukupan tersebut diharapkan implementasinya juga dapat terlaksana sesuai dengan fungsinya, namun fakta di lapangan jumlah sumber daya yang cukup tidak selaras dengan kemampuan sumber daya tersebut, sehingga menghasilkan performa yang kurang mumpuni padahal dari segi pendidikan ada banyak remaja anggota PIK-R Mawar yang memang sedang menempuh pendidikan sarjana. Harusnya dengan latar belakang pendidikan yang demikian diimbangi dengan remaja-remaja tersebut yang gencar melakukan sosialisasi, promosi dan sebagainya guna menarik minat remaja lainnya. Beberapa hambatan dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja berkaitan dengan sumber daya manusia diantaranya yaitu rendahnya kesadaran remaja akan pentingnya kebijakan, kesibukan para remaja, kurangnya koordinasi antar remaja, ketergantungan terhadap yang dewasa, kurang melakukan promosi serta rendahnya tingkat kehadiran dalam pertemuan. Berbagai upaya sudah dilakukan namun belum mendapatkan *feedback* yang baik.

Sumber daya anggaran

Berdasarkan hasil wawancara didapati keterangan bahwa dalam sumber daya anggaran, kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Mawar tidak sepenuhnya berasal dari anggaran APBDDes, kegiatan lebih sering dibiayai secara mandiri oleh para remaja. Anggaran untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang membutuhkan dana yang cukup besar biasanya dihasilkan dari usaha kreatif remaja Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta mengumpulkan sumbangan dari warga sekitar atau dari perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Desa Kertabumi.

Kemudian berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti mengamati secara langsung proses peluncuran dana kegiatan PIK-R Mawar berasal dari manakah dana tersebut dan

berdasarkan pengamatan secara langsung dimana dana untuk kegiatan-kegiatan PIK-R lebih sering diperoleh dengan cara mencari donatur dan sumbangan dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya arsip proposal untuk pendanaan kegiatan. Dari pihak desa pun sebenarnya ada namun diberikan kepada pihak Kampung KB terlebih dahulu. Selebihnya menggunakan kas PIK-R yang memang sudah ada dari hasil ekonomi produktif remaja. Namun sangat disayangkan, fakta di lapangan mengatakan bahwa kegiatan ekonomi produktif yakni bank sampah yang dikelola oleh remaja PIK-R Mawar sudah tidak berjalan lagi sejak akhir tahun 2020. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ada lagi catatan dalam buku keuangan bank sampah. Dari penelitian ini ditemukan beberapa hambatan dalam sumber daya anggaran diantaranya yaitu belum tetapnya anggaran yang diterima serta rendahnya keterlibatan dan kekompakan remaja dalam usaha ekonomi produktif yang pernah dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menganalisa bahwa dalam indikator sumber daya anggaran, anggaran yang ada belum maksimal terlihat dari belum konsistennya anggaran dalam hal jumlah dan waktu.

Sumber daya fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa sumber daya fasilitas juga berperan penting dalam menunjang pelaksanaan suatu kebijakan. Tersedianya fasilitas yang layak seperti ruang sekretariat dan peralatan pembantu akan menjadi faktor pendukung pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Dari segi sarana prasarana, berbagai fasilitas yang tersedia belum memadai dengan baik. Yang menjadi hambatan dalam sumber daya fasilitas adalah minimnya ketersediaan anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menganalisa bahwa dalam indikator sumber daya fasilitas, fasilitas yang tersedia kurang memadai dan cenderung kurang diperhatikan. Belum memadainya fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan tentang konseling perilaku remaja oleh pengurus PIK-R Mawar menyebabkan terhambatnya kegiatan tersebut, sehingga perlu adanya perbaikan dan pengadaan fasilitas.

3. Kualitas hubungan interorganisasional

Dimensi ini juga turut menentukan keberhasilan tujuan dari implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi. Ketika para implementor sudah memiliki pengetahuan tentang apa yang akan mereka kerjakan maka implementasi akan berjalan efektif. Pelaksanaan suatu kebijakan kerap menuntut tata cara dan mekanisme kelembagaan yang menguatkan struktur yang berada di atas melakukan monitoring supaya implementasi bekerja sesuai dengan tujuan dan standar yang sudah ditentukan.

Proses komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi implementor yaitu para remaja sudah cukup terbangun serta ketaatan implementor terhadap aturan juga cukup terlihat. Namun masih ditemukan beberapa hambatan salah satunya yaitu rendahnya dukungan dan semangat dari remaja.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menganalisa bahwa dalam indikator proses komunikasi yang mana PIK-R Mawar berada di bawah naungan Kampung KB saling bekerjasama dalam melaksanakan kegiatannya terlebih jika ada masalah ataupun kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan PIK-R, kelompok kerja Kampung KB selalu siap membantu menghadapi masalah dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

Mekanisme kelembagaan

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme kelembagaan belum maksimal, koordinasi yang terjadi sudah ada namun tidak rutin. Untuk informasi berkaitan dengan kendala, hambatan yang disampaikan hanya perihal pernyataan-pernyataan setelah mengadakan kegiatan saja, belum terperinci dengan jelas dan mendalam dari awal pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Mawar Desa Kertabumi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menganalisa bahwa dalam indikator mekanisme kelembagaan, koordinasi yang terjadi cukup terbangun, namun tidak menyeluruh karena pertemuan yang tidak rutin, terlebih pada saat pandemi Covid-19. Remaja PIK-R Mawar dan kelompok kerja Kampung KB saling bekerjasama dalam melaksanakan beragam kegiatan, namun kegiatan yang berjalan tersebut masih minim, salah satunya dalam bentuk rapat kerja serta membuat kegiatan dalam rangka meningkatkan sosialisasi, promosi, dan apresiasi bagi pengelola program PIK-R Mawar.

4. Karakteristik lembaga pelaksana

Karakteristik implementor dalam suatu kebijakan harus memiliki karakter ketat pada aturan dan taat pada sanksi. Karakteristik lembaga pelaksana menunjuk besarnya daya dukung lembaga pelaksana yakni organisasi resmi maupun tidak resmi yang turut terjun dalam implementasi kebijakan (Mulyawan, 2021). Pada dimensi karakteristik lembaga pelaksana, peneliti menguraikan ke dalam dua indikator yang terdiri dari struktur organisasi dan norma.

Struktur organisasi

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa struktur organisasi dalam kepengurusan Pusat Informasi dan Konseling Remaja menggambarkan jelas pemisahan tugas satu sama lain. Hal ini terlihat dari adanya struktur organisasi yang lengkap dalam lampiran susunan pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja Mawar berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Kertabumi Nomor 10 Tahun 2019. Akan tetapi, perwujudan tanggung jawab yang diberikan belum sempurna, pembagian tugas yang jelas tidak berjalan dalam pelaksanaannya, pekerjaan masih banyak yang dikerjakan pengurus inti. Pengurus yang pasif hanya berperan sebagai anggota serta tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Rendahnya kesadaran beberapa remaja terhadap tanggung jawabnya mengakibatkan Pusat Informasi dan Konseling Remaja tidak berjalan secara efektif sebagaimana pedoman yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menganalisa bahwa dalam indikator struktur organisasi diperlukan adanya pembinaan yang rutin. Struktur organisasi yang terlalu panjang dan banyak akan cenderung melemahkan pelaksanaan dan menyebabkan prosedur yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja Mawar menjadi tidak sesuai.

Norma

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa norma disini mencakup bentuk kewajiban implementor yaitu remaja untuk melaksanakan kebijakan dengan baik serta membuat laporan kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang sudah dijalankan di Desa Kertabumi untuk kemudian dilakukan evaluasi. Namun dalam pelaksanaannya, laporan tersebut belum konsisten dilaporkan terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 membuat beberapa rencana kegiatan tidak terlaksana yang menjadikannya tidak ada laporan kegiatan yang diserahkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menganalisa bahwa dalam indikator norma, remaja dituntut untuk memiliki komitmen untuk patuh terhadap aturan. Selain itu, untuk saat ini pengadministrasian seluruh kegiatan PIK-R diberikan kemudahan melalui aplikasi New SIGA (Sistem Informasi Keluarga) yang diterapkan BKKBN dengan tujuan memberikan keterangan yang lengkap dan diperlukan siapa saja, kapan saja, serta memberikan catatan dan laporan dengan biaya dan waktu yang lebih efisien.

5. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi

Pada implementasi kebijakan diperlukan bantuan positif dari lingkungan yang ada, baik lingkungan politik, sosial maupun ekonomi. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi tolak ukur apakah suatu kinerja dalam melaksanakan kebijakan sudah berhasil atau tidak dan sejauh mana lingkungan dari luar turut mendorong keberhasilan suatu kebijakan. Dalam hal ini (Rahayu, 2018) mengemukakan bahwa kondisi politik, sosial dan ekonomi harus dipertimbangkan dalam mendukung ketercapaian tujuan yang tepat dan terarah, karena lemahnya kondisi ini dapat meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Lingkungan eksternal

Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi ini memperoleh *support* dari masyarakat terbukti dari banyaknya masyarakat yang berharap kebijakan ini bisa tetap berlanjut dan ditingkatkan, sebab manfaatnya pun telah memberikan pengaruh positif terhadap pengetahuan remaja maupun masyarakat, serta masyarakat merasa terbantu dalam meminimalisir perilaku menyimpang remaja yang ada di Desa Kertabumi. Namun, untuk aktivitas di luar sekretariat perlu dilakukan agar jangkauan lebih luas, khususnya seluruh remaja Desa Kertabumi dapat terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dukungan dari masyarakat menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini, berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memang sering menuai pro dan kontra. Namun, tetap direspon dengan baik serta diberi pemahaman oleh pelaksana kebijakan. Lingkungan eksternal memberikan dukungan terhadap kebijakan tentang konseling perilaku remaja oleh pengurus PIK-R sebagai sarana untuk meminimalisir kenakalan remaja.

Pengaruh kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa para implementor mempunyai pendapat yang sama terhadap pengaruh kebijakan yang terjadi setelah adanya kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, dimana semua informan berpandangan positif. Pengaruh ini dapat terjadi pada wawasan, sikap dan perilaku remaja. Berdasarkan hasil observasi di lapangan mengenai pengaruh kebijakan, komunikasi yang terjalin senantiasa sangat menentukan seberapa besar pengaruh yang terjadi pada remaja anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menganalisa bahwa dalam indikator pengaruh kebijakan, pengaruh tersebut ditentukan oleh pesan yang disampaikan, media yang digunakan, serta perhatian remaja. Proses komunikasi dapat dikatakan berhasil ketika pesan mengenai materi-materi PIK-R yang disampaikan oleh kader PIK-R Mawar Desa Kertabumi atau dinas/instansi kepada para anggota remaja melalui pemanfaatan acara pertemuan sebagai

media komunikasi yang digunakan diterapkan. Dari proses tersebut, terdapat pengaruh yang diperoleh sebagai umpan balik dari para anggota remaja setelah mengetahui materi tersebut. Pengaruh ini berupa efek positif, dalam artian bahwa para anggota remaja pro terhadap materi tersebut, remaja menjadi lebih terarah dalam menentukan keberlangsungan hidupnya.

6. Disposisi implementor

Disposisi ialah watak serta sikap implementor dalam melaksanakan kebijakan. Apabila implementor mempunyai sikap yang menerima maka pelaksanaan kebijakan bisa sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Begitu pun sebaliknya (Bukit, 2020). Ketika implementor sepatutnya dengan tujuan dari kebijakan, maka mereka bisa menjalankannya dengan sukacita, tetapi jika pemahaman mereka berbanding terbalik maka proses pelaksanaannya akan mendatangkan banyak hambatan.

Pemahaman pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan didapati informasi bahwa pemahaman remaja terhadap kehadiran Pusat Informasi dan Konseling Remaja sudah paham namun belum merata, terlebih dengan masih banyaknya anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang jarang terlibat mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Kontribusi remaja dalam program Pusat Informasi dan Konseling Remaja sebenarnya mempunyai banyak manfaat seperti menambah pengetahuan mengenai segala hal yang juga berhubungan dengan penyiapan kehidupan berkeluarga, *life skills*, kesehatan remaja serta pengembangan karakter bagi remaja. Sebagaimana kita ketahui, usia remaja merupakan usia produktif yang diharapkan terhindar dari bahaya narkoba, seks bebas dan permasalahan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman remaja sebagai implementor dalam kebijakan PIK-R di Desa Kertabumi merupakan suatu syarat yang penting untuk meningkatkan partisipasi dari remaja lainnya. Remaja sebagai sasaran juga perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai kebijakan yang dilaksanakan. Pemahaman mengenai tujuan dan sasaran juga penting untuk diketahui oleh remaja.

Sikap tanggap pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, remaja cukup tanggap terhadap permasalahan yang terjadi. Namun, dalam hal ini tidak adanya konselor sebaya dan pendidik sebaya menjadi hambatan tersendiri, padahal konselor sebaya dan pendidik sebaya mempunyai peran penting dalam memberikan konseling terhadap remaja sebayanya. Konselor sebaya dan pendidik sebaya ini merupakan kader Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang sudah atau belum mengikuti pelatihan konseling yang nantinya bertanggung jawab terhadap ketua Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan secara fungsional memiliki kemampuan dan motivasi yang lebih tinggi dari remaja anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menganalisa bahwa dalam indikator sikap tanggap pelaksana diperlukan adanya suatu upaya peningkatan kualitas agar kedepannya remaja mampu memberikan saran dan arahan terhadap remaja sebayanya yang memang sedang membutuhkan solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis secara umum telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pelaksanaan indikator yang pelaksanaannya kurang sesuai dengan indikator-indikator yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan. Dari 13 indikator yang digunakan dalam penelitian, terdapat 7 indikator yang berjalan dengan baik diantaranya yaitu adanya sasaran yang hendak dicapai, adanya standar kebijakan yang ditetapkan, proses komunikasi yang terjalin, adanya dukungan dari lingkungan eksternal, adanya pengaruh positif dari kebijakan tentang konseling perilaku remaja, adanya pemahaman dari implementor serta adanya sikap tanggap yang baik dalam melaksanakan kebijakan. Kemudian terdapat 6 indikator yang belum berjalan diantaranya yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, mekanisme kelembagaan, struktur organisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja, serta norma dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya yaitu sumber daya manusia yang cukup tidak diikuti dengan kompetensi sumber daya itu sendiri, anggaran yang tidak konsisten, rendahnya keterlibatan remaja dalam usaha ekonomi produktif, kesibukan remaja sehingga kegiatan pertemuan masih bersifat melihat peluang, koordinasi yang belum rutin dilakukan, rendahnya tanggung jawab remaja dalam struktur organisasi, serta tidak ada laporan kegiatan selama pandemi Covid-19. Untuk upaya yang dilakukan sejauh ini hanya mengundang narasumber yang kompeten dalam menyampaikan materi PIK-R, mencari donatur untuk melaksanakan kegiatan besar, membuat usaha ekonomi produktif bank sampah serta mengikuti pelatihan pengadministrasian PIK-R.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan beberapa masukan dan saran diantaranya yaitu:

1. Kepada para implementor, berkaitan dengan dimensi sumber daya, dalam sumber daya manusia yang belum kompeten diharapkan adanya peningkatan kompetensi dan tanggung jawab dengan mengikuti pembinaan dan pelatihan dari BKKBN atau instansi terkait atau dari Forum GenRe Jawa Barat untuk membekali remaja dengan wawasan, pengetahuan, nilai, dan keterampilan terutama yang berkaitan dengan pemahaman terhadap implementasi kebijakan PIK-R. Kemudian, dengan belum konsistennya anggaran yang diberikan, remaja diharapkan mampu mengelola kembali usaha ekonomi produktif yang sebelumnya sudah berjalan. Selanjutnya, dalam sumber daya fasilitas, implementor dapat menginfentarisasi kebutuhan sarana dan prasarana Pusat Informasi dan Konseling Remaja dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada agar remaja dapat menjalankan kegiatan dengan optimal. Selain itu, berkaitan dengan kualitas hubungan interoganisasional, dalam dimensi mekanisme kelembagaan diperlukan adanya koordinasi secara rutin serta sebaiknya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan PIK-R Mawar di Desa Kertabumi berupa kejelasan *Standart Operational Procedure* (SOP) yang diberlakukan. Kemudian dalam dimensi karakteristik lembaga pelaksana dengan indikator struktur organisasi dan norma diharapkan adanya peningkatan kesadaran implementor dalam tanggung jawab terhadap tugasnya serta dalam pelaporan pengadministrasian pun perlu

- dilakukan mengingat saat ini remaja diberi kemudahan untuk memberikan catatan dan laporan dengan biaya dan waktu yang efisien melalui aplikasi New SIGA (Sistem Informasi Keluarga) yang diterapkan oleh BKKBN. Dengan beberapa saran di atas diharapkan tujuan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dapat tercapai dengan baik.
2. Kepada peneliti selanjutnya untuk bisa menjadikan hasil penelitian ini sebagai batu loncatan untuk melaksanakan penelitian serupa mengenai implementasi kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal lagi.

REFERENSI

- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ariani, Desi. (2018). *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- BKKBN. (2012). *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M)*. Jakarta: BKKBN.
- Bukit, Alexander. (2020). *Analisis Pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Kampung KB, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Cahya Putri, G. (2019). *Pelaksanaan Program PIK R dan Dampaknya bagi Remaja*. Skripsi. Universitas Jember.
- Endah, K., & Kholiq, W. A. (2019). "Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) dalam Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sejahtera (Studi Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran)". *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5 (2), 101-112.
- Kaltimprov. 2013. "Remaja Rentan Resiko Triad KRR", <https://www.kaltimprov.go.id/berita/remaja-rentan-risiko-triad-kr>, diakses pada 21 Januari 2022.
- Mayasari, S., & Husin, A. (2017). "Remaja GenRe: Peluang Menuju Bonus Demografi". *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, 1 (2), 4-8.
- Mulyawan, B., & Mailiyatuzzahro, N. (2021). *Implementasi Program Generasi Berencana di Kabupaten Indramayu*. *Aspirasi*, 11(2), 50-62.
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Rahayu, Aprillia. (2018). *Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.
- Ratnasari, A. (2017). "Implementasi Program Generasi Berencana (GENRE) dalam Menyiapkan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja". *Public Corner*, 12 (2), 37-47.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

- Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas SK Nomor 9 Tahun 2017 Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) “Mawar” di Dusun Nagrog Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.
- Toun, N. R., & Nufus, H. (2015). Implementasi Program Pusat Informasi Konseling Mahasiswa (PIK-M) BKKBN di Kota Palangka Raya. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 1 (1), 1-4.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.